

SEGREGASI ETNO-RELIGIUS: Upaya Resolusi Konflik dan Pembangunan Perdamaian

Mustain, dkk.

IAIN Mataram

e-mail: mustainrema@yahoo.com

Abstract

Ethno-religious segregation in Lombok, especially in Mataram existed because of population migration and the implication of the implemenation of the policy on the politic of Karang Asem Hinduism Mataram Kingdom that dominated this area for more than one century (1670-1820). The policy subjected to the community made the fixed social stratification in the context of community settlement, and generated two different groups, the Balinese-Hiduism as the noble and Sasak-Muslim as the lower-level society members. Applying qualitative method and conflict study approach it was revealed that historical legacy had been become the social-psychological barrier for the two communities for making open and trustful interaction.

Segregasi etno-religius di wilayah Lombok, khususnya di Mataram selain terjadi karena migrasi penduduk, juga merupakan implikasi dari penerapan kebijakan politik kerajaan Hindu Karangasem Mataram yang menguasai wilayah ini selama 1,5 abad, yaitu dari tahun (1670-1820 M). Kebijakan itu antara lain dalam bentuk mempertahankan stratifikasi sosial masyarakat dalam pemukiman, sehingga melahirkan komunitas Bali-Hindu sebagai kelompok bangsawan dan komunitas Sasak-Islam sebagai kelompok rakyat kelas bawah. Melalui metode kualitatif dan pendekatan kajian konflik tampak bahwa warisan sejarah telah menjadi hambatan psikologis-sosial kedua komunitas untuk berinteraksi secara terbuka dan saling mempercayai.

Keywords: segregasi, Lombok, Bali-Hindu, Sasak-Islam, etno-religius

A. Pendahuluan

Kebanggaan terhadap kehidupan berbangsa Indonesia yang satu di atas kebhinnekaan bisa jadi merupakan bayang-bayang semu. Kokohnya bangunan supra-struktur negara kebangsaan yang dibanggakan dan digembargemborkan selama rru tidak lain hanyalah rancang bangun negara kebangsaan yang sangat rapuh.¹ Rapuhnya bangunan supra-struktur negara kebangsaan Indonesia tersebut tampak dalam berbagai konflik yang marak terjadi di negara kepulauan ini. Beragam jenis kekerasan sosial terjadi silih berganti di berbagai kawasan, termasuk di Pulau Lombok.

Kekerasan dan konflik sosial seringkali terjadi di wilayah Kecamatan Cakranegara, khususnya Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Utara, dan kelurahan Selagalas. Di Kelurahan Cakranegara Barat, kawasan rawan ketegangan dan konflik adalah dua lingkungan, yaitu Karang Jasi yang Hindu dan Karang Tapen yang Muslim. Di Kelurahan Cakranegara Utara, ketegangan seringkali terjadi antara warga Taliwang yang Muslim dengan warga Tohpati-Sindu yang Hindu. Di Kelurahan Selagalas, ketegangan banyak di antara warga Nyangget dengan warga Saksari-Sindu yang masuk wilayah Kelurahan Cakranegara Utara.

Ketegangan dan konflik terbuka antara warga Karang Jasi dengan Karang Tapen di Kelurahan Cakranegara Barat telah beberapa kali terjadi, baik dalam skala kecil maupun besar. Modusnya selalu berawal dari persoalan kecil yang melibatkan anak-anak muda namun kemudian bereskalasi menjadi konflik sosial yang meluas.² Sementara konflik terbuka antara masyarakat Taliwang dengan masyarakat Tohpati-Sindu terjadi pada tahun 2000. Konflik yang terjadi di antara dua kampung yang hanya dipisahkan oleh jalan raya ini dipicu oleh sentimen keagamaan berkaitan dengan upacara keagamaan umat Hindu, yaitu *Hari Raya Nyepi*. Interaksi yang tidak sehat antara masyarakat Tohpati-Sindu yang sedang melaksanakan upacara Nyepi dengan masyarakat Taliwang yang sedang melaksanakan upacara pemulangan haji berbuntut konflik terbuka. Meski akhirnya dapat diredam oleh

¹ Benedict Anderson, *Violence and the State in Suharto's Indonesia*, (Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University, 2001).

² Bambang, wawancara, tanggal 8 Oktober 2008.

Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan, SH namun kontak fisik yang melibatkan massa dari kedua kampung tersebut terlanjur terjadi.³

Konflik terbuka yang melibatkan dua komunitas yang berbeda agama juga terjadi dalam peristiwa Nyangget-Saksari. Konflik yang semula hanya terjadi antar dua kelompok anak muda yang sedang bermabuk-mabukan dengan cepat telah menjadi konflik keagamaan dalam skala massif. Masyarakat Nyangget yang memeluk Islam dan masyarakat Saksari yang gama Hindu dalam sekejap terlibat dalam konflik berkepanjangan yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban.⁴

Dari beberapa konflik yang terjadi di Pulau Lombok tersebut, tampaknya ada beberapa kecenderungan yang menarik untuk dicermati. *Pertama*, konflik-konflik tersebut cenderung tidak menemukan titik akhir, bahkan cenderung meningkat di tengah masyarakat. *Kedua*, konflik-konflik tersebut tampak seperti sengaja dipertahankan dan dipelihara oleh masyarakat dan pemerintah yang ditandai dengan tidak adanya kebijakan-kebijakan progresif yang bersifat preventif-antisipatif untuk melakukan pencegahan konflik susulan. *Ketiga*, konflik tersebut selalu berawal dari hal-hal yang sangat sepele tetapi kemudian bereskaiasi menjadi konflik sosial dalam skala massif.

Maraknya konflik massal yang terjadi di Pulau Lombok tersebut tentu terkait dengan pola domisili masyarakat yang cenderung mengelompok secara eksklusif sesuai dengan etnik, agama dan aliran keagamaan, bahkan afiliasi politik. Sebagaimana diketahui, sembilan puluh delapan persen penduduk Lombok beragama Islam. Di samping itu terdapat juga penganut agama Hindu Bali yang sebagian besar berdomisili di Lombok Barat dan Kota Mataram. Penganut Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Konghucu merupakan kelompok minoritas yang biasanya tinggal secara berkelompok. Umat Hindu banyak terkonsentrasi di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan Kecamatan Mataram. Umat Hindu Bali membentuk komunitas sendiri di Sindu, Karang Medain, Karang Bedil Mataram dan Narmada, Lombok Barat.

Umat Islam yang merupakan kelompok mayoritas di Pulau Lombok juga hidup dan tinggal secara berkelompok berdasarkan aliran keagamaan, afiliasi

³ M. Nahwi, wawancara, tanggal 11 Oktober 2008.

⁴ H. Rosyidi, wawancara, tanggal 11 Oktober 2008.

organisasi kemasyarakatan dan afiliasi partai politik. Hal ini tampak dalam Nahdlatul Wathan (NW), organisasi keagamaan terbesar yang kemudian terpecah menjadi dua, yaitu Nahdlatul Wathan (NW) Anjani dan Nahdlatul Wathan (NW) Pancor. Meski berakar dari paham keagamaan yang sama, bahkan juga pendiri yang sama, kedua simpalisan organisasi keagamaan tersebut juga mengelompok dalam wilayah yang berbeda.

Organisasi keagamaan terbesar kedua, Nahdlatul Ulama (NU), juga memiliki kecenderungan yang sama. Organisasi keagamaan yang banyak menaungi pondok pesantren dan memiliki basis massa yang cukup besar ini juga terfragmentasikan dalam beberapa kelompok yang terbedakan berdasarkan afiliasi partai politik pilihannya. Di luar Nahdlatul Wathan (NW) dan Nahdlatul Ulama (NU), terdapat juga pengikut Muhammadiyah yang banyak memiliki lembaga pendidikan tinggi dan rumah sakit, dan beberapa organisasi lokal seperti Yatofa, Marakit dan Ta'limat. Selain itu, terdapat juga beberapa aliran keagamaan seperti Jamaah Tabligh yang biasa disebut "Jamaah Kompor", kelompok Syi'i, Salafi dan Wahabi yang cukup militan. Yang terakhir disebut ini seringkali melakukan proses "Arabisasi" dengan cara membat habis tradisi masyarakat Sasak yang dianggap sesat karena mereka pandang sebagai bid'ah.⁵

Pola domisili secara berkelompok ini seakan-akan mempertegas identitas masing-masing sebagai kelompok yang berbeda dari lainnya. Bahkan, pola domisili yang terpisah tampaknya tidak cukup untuk menegaskan identitas kelompok yang berbeda tersebut. Pengelompokan secara terpisah tidak saja terjadi dalam pola domisili, melainkan juga terjadi dalam transaksi ekonomi. Umat Hindu banyak terkonsentrasi di Pasar Sindu, Cakranegara. Beberapa kawasan di Cakranegara, banyak lahan pertanian yang dibeli dan dijadikan toko dan *mall* oleh etnik Tionghoa yang diidentikkan sebagai penganut Katolik. Hampir semua toko yang ada di Kota Ampenan banyak dikuasai oleh umat Islam dan masyarakat keturunan Arab.

Dalam hal ini, pengelompokan-pengelompokan komunitas secara terpisah tersebut mengindikasikan adanya fenomena segregasi etno-religius di kawasan Pulau Lombok. Fenomena semacam ini 'tentu menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut. Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam

⁵ Wahid, Irfan, "Anatomi Konflik Etno-religius di Pulau Lombok," Laporan Penelitian, 2008.

penelitian ini adalah: (1) Bagaimana latar belakang historis terjadinya segregasi etno-religius di Pulau Lombok? (2) Sejauhmana segregasi etno-religius tersebut berpotensi menimbulkan konflik di Pulau Lombok? (3) Apa potensi positif dan negatif dari pengelompokan-pengelompokan masyarakat (*social segregation*) di Pulau Lombok bagi upaya resolusi konflik dan pengembangan damai?

B. Struktur Sosial dan Pembedaan

Struktur sosial adalah penyebaran secara kuantitatif warga komunitas dalam berbagai posisi sosial yang berbeda yang mempengaruhi hubungan di antara mereka (termasuk di antaranya hubungan konflik). Karakteristik pokok dari struktur yaitu adanya berbagai tingkat ketidaksamaan atau keberagaman antar bagian dan konsolidasi yang timbul dalam kehidupan bersama, sehingga mempengaruhi derajat hubungan antar bagian itu yang berupa dominasi, eksploitasi, konflik, persaingan dan kerjasama. Ada dua basis parameter pembedaan struktur, yaitu nominal dan gradual. Parameter nominal membagi komunitas menjadi sub-sub bagian atas dasar batas yang cukup misalnya ras, agama, jenis kelamin, pekerjaan, marga, etnik, tempat tinggal, afiliasi politik, bahasa, nasionalitas dan lain-lain.⁶ Pengelompokan yang bersifat horisontal ini akan melahirkan berbagai "golongan". Sementara parameter gradual membagi komunitas ke dalam berbagai peringkat status yang menciptakan perbedaan kelas, seperti pendidikan, pendapatan, kekayaan, prestise, kekuasaan dan sebagainya. Pengelompokan yang bersifat vertikal ini melahirkan berbagai "lapisan". Pengelompokan-pengelompokan semacam itu akan menghasilkan apa yang disebut sebagai kelompok mayoritas dan minoritas.

Interaksi antar bagian dalam kehidupan bersama dapat terjadi antar kelompok, baik atas dasar parameter nominal maupun gradual. Interaksi antar bagian dalam kehidupan sosial dapat mengakibatkan konflik antar individu anggota dari berbagai "golongan" dan "lapisan" tersebut, juga antara kelompok mayoritas dan minoritas.

⁶ Peter Blau, *Inequity And Homogeneity: a Primitive Theory of Social Structure*, (New York: The Free Press, 1977).

Ada tiga hal yang melatarbelakangi munculnya disinteraksi antara mayoritas dan minoritas, yaitu prasangka historis, diskriminasi dan perasaan superioritas yang berlebihan.⁷ Dalam hal ini konsentrasi kelompok-kelompok dalam suatu kawasan secara eksklusif dapat mengakibatkan adanya polarisasi sosial, yaitu proses perenggangan dan pertentangan antar lapisan atau golongan masyarakat yang pada gilirannya akan mengakibatkan konflik sosial. Konflik antar individu dari kelompok yang berbeda dapat menyeret pada konflik antar kdompok yang berbeda tersebut.

C. Segregasi Etno-Religius di Pulau Lombok

Berbeda dengan pola domisili di kawasan lain yang cenderung mem-baur, pola domisili di Pulau Lombok cenderung mengelompok sesuai dengan etnik dan agama. Etnik Bali yang kebanyakan beragama Hindu mengelompok dalam lingkungan tersendiri terpisah dari etnik lain yang kebanyakan beragama Islam. Kecenderungan segregasi sosial ini terutama sekali banyak ditemukan di Kodia Mataram, kawasan yang sekarang menjadi ibukota Pro-vinsi Nusa Tenggara Barat. Kecenderungan segregasi sosial di Kodia Mataram tersebut secara mencolok dapat dilihat di Kecamatan Cakranegara, kawasan yang di masa lalu pernah menjadi ibukota Kerajaan Karangasem Sasak yang kemudian bermetamorfosis menjadi Kerajaan Cakranegara.

Sebagai kawasan bekas ibukota kerajaan, Cakranegara merupakan kawasan di “Pulau Seribu Masjid” yang memiliki pola tata kota yang paling teratur. Sejak awal kawasan ini memang didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan penataan kependudukan. Sebagaimana tergambar dalam namanya, yaitu Cakranegara yang berarti kawasan kota atau negara yang membentuk lingkaran, perkampungan-perkampungan yang ada memang didesain melingkari kawasan yang di dalamnya terdapat istana Kerajaan Cakranegara. Perkampungan-perkampungan yang ada seperti berjajar me-lingkar dengan membentuk beberapa ring. Ring pertama merupakan ring yang paling dekat dengan bekas-bekas istana kerajaan. Karena merupakan meruapakan ring dengan radius terdekat maka dengan sendirinya per-kampungan di ring tersebut tentu tidak sebanyak di ring kedua dan seterusnya

⁷ Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), h. 147.

nya. Bekas-bekas keteraturan tata kota di masa lalu tersebut masih bisa dilihat hingga sekarang. Setiap jarak tertentu akan ditemukan gang-gang yang memudahkan sistem transportasi. Pada tiap jarak tertentu juga akan ditemukan saluran irigasi yang memudahkan sistem pengairan kawasan tersebut, sistem irigasi yang tampaknya memiliki pola yang sama dengan model subak di Bali. Hal ini tentu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kekuasaan Hindu Bali di kawasan tersebut.

Ring pertama merupakan kawasan-kawasan yang paling banyak dihuni oleh komunitas Hindu yang biasanya memiliki taraf ekonomi menengah ke atas. Saat ini mereka merupakan komunitas yang mewarisi bukan hanya kebesaran masa lalu dari Kerajaan Hindu Cakranegara, melainkan juga mewarisi tanah-tanah yang cukup luas. Hampir setiap kepala keluarga dari komunitas Hindu ini memiliki rumah yang cukup luas di atas sebidang tanah berukuran 5 are (500 M²). Keluasan tanah tersebut memungkinkan setiap keluarga mendirikan sanggah, tempat peribadatan milik pribadi atau keluarga. Sanggah tersebut biasanya didirikan di depan rumah. Tiap rumah di kawasan komunitas Hindu ini biasanya dikelilingi oleh pagar tembok yang cukup tinggi dengan satu atau lebih anjing yang menjaganya.⁸ Meski kawasan ini merupakan kawasan-kawasan berpenduduk Hindu, ada juga beberapa keluarga beragama Islam. Keluarga-keluarga Muslim tersebut biasanya adalah para pekerja pendatang baru yang menetap di kawasan tersebut baru sekitar dua puluhan tahun yang lalu. Taraf ekonomi keluarga-keluarga minoritas Muslim tersebut biasanya adalah menengah ke bawah.⁹

Sedangkan ring kedua merupakan kawasan-kawasan yang relatif heterogen dibanding ring pertama, meski kawasan pemukimannya tetap terpisah antara perkampungan Hindu dan perkampungan Muslim. Sebagaimana komunitas Hindu di kawasan ring pertama, komunitas Hindu di kawasan ring kedua inipun juga memiliki pekarangan rumah yang cukup luas karena mereka juga ewaris tanah-tanah kerajaan yang luas tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan kawasan-kawasan perkampungan mayoritas Muslim yang biasanya menempati rumah yang berdiri di atas tanah yang rata-rata berukuran 1 are (100 M²). Meski demikian, ada juga beberapa keluarga di

⁸ Ida Bagus Ngurah Pidada, wawancara, tanggal 5 Juli 2009.

⁹ H. Fathul Imran, wawancara, tanggal 5 Juli 2009.

antaranya yang cukup kaya dan memiliki tanah pekarangan rumah yang cukup luas. Meski kawasan tersebut dihuni oleh komunitas Muslim, namun ada juga kelompok keluarga minoritas Hindu.

Meski kawasan-kawasan berpenduduk Hindu tersebut berdampingan dengan kawasan-kawasan berpenduduk Muslim, komunikasi di antara kawasan-kawasan berpenduduk beda agama tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Gang-gang dan jalan-jalan kecil yang membelah perkampungan-perkampungan berbeda agama tersebut tampaknya betul-betul menjadi “tembok pemisah” yang memisahkan mereka. Jarang sekali ada warga dari perkampungan Muslim yang menyeberang ke perkampungan Hindu untuk sekedar bermain atau bercanda ria. Demikian juga jarang ada warga perkampungan Hindu yang menyeberangi jalan ke perkampungan Muslim. Hal ini tampak sangat mencolok di Karang Tapen yang berpenduduk Muslim dan Karang Jasi yang berpenduduk Hindu, Nyangget yang berpenduduk Muslim dan Saksari yang berpenduduk Hindu, Taliwang yang berpenduduk Muslim dan Tohpati yang berpenduduk Hindu, dan lain-lain.

Segregasi sosial tersebut bagaimanapun juga berpotensi menimbulkan konflik dalam skala massif. Tidak adanya komunikasi yang efektif bagi kawasan-kawasan berbeda agama tersebut merupakan “rumput kering” yang sewaktu-waktu akan mudah terbakar. Minimnya kesadaran untuk bersikap tenggang rasa dan bertoleransi antar umat beda agama juga menjadi “bom waktu” yang setiap saat dapat meledak. Hal ini tampak misalnya dalam ungkapan seorang warga Hindu yang mensikapi adzan yang menggunakan pengeras suara (*loud speaker*): “Orang Islam itu *kedok* (tuli), jadi kalau beribadah ya harus diundang dengan menggunakan pengeras suara”.

D. Sejarah Segregasi Sosial di Pulau Lombok

Pengelompokan-pengelompokan komunitas berdasarkan perbedaan-perbedaan etnik dan agama yang ada di Mataram saat ini bukanlah sesuatu yang baru. Segregasi sosial tersebut terjadi dalam sebuah proses yang cukup lama dan tidak sepenuhnya berlangsung secara alami. Tidak ditemukan data-data sejarah yang valid yang menjelaskan bagaimana proses segregasi sosial tersebut terjadi. Penjelasan mengenai proses segregasi sosial tersebut diperoleh dari sumber-sumber lisan (*oral history*).

Sumber-sumber lisan menjelaskan bahwa segregasi sosial yang terjadi di Mataram saat ini merupakan efek dari sebuah proses panjang dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kerajaan Karangasem, kerajaan Hindu yang pernah berkuasa di Pulau Lombok pada masa lalu. Kerajaan ini memiliki hubungan kedinastian dengan Kerajaan Hindu Karangasem di Bali. Pada abad ke-17 M, Penguasa Kerajaan Hindu Karangasem di Bali mengirimkan sebuah ekspedisi penaklukan ke Pulau Lombok. Ekspedisi ini berhasil menaklukkan Selaparang, Kerajaan Islam yang memerintah di Pulau Lombok saat itu. Keberhasilan ekspedisi Karangasem ini tidak terlepas dari dukungan Arya Banjar Getas, keluarga Kerajaan Selaparang yang membelot ke Kerajaan Hindu Karangasem.

Serangan Kerajaan Hindu Karangasem ini bukan saja mengakibatkan jatuhnya Kerajaan Islam Selaparang melainkan juga menyebabkan komunitas Muslim di Pulau Lombok terusir ke kawasan-kawasan pinggiran pulau tersebut. Komunitas-komunitas Muslim yang semula mendiami wilayah-wilayah perkotaan pun melarikan diri ke kawasan-kawasan pedalaman yang lepas dari kontrol kekuasaan penguasa Hindu yang baru. Meski demikian, ada juga komunitas Muslim yang tetap bertahan di tempat mereka tinggal dengan bersikap kooperatif terhadap penguasa Hindu yang baru. Mereka yang bersikap kooperatif terhadap penguasa Hindu inilah yang kemudian disebut dengan *batur Bali*, yang berarti teman atau pembantu orang-orang Hindu yang berasal dari Bali. Selebihnya adalah orang-orang yang lebih memilih melarikan diri ke wilayah-wilayah yang aman. Saat di mana komunitas Muslim Selaparang terusir dari wilayah ibukota kerajaan tersebut disebut dengan jaman rarutan, yang berarti masa pelarian atau terusir dari kampung halaman.

Komunitas Muslim yang melarikan diri dari wilayah ibukota kerajaan tersebut mengelompok sesuai dengan daerah asal mereka. Mereka kemudian membuka perkampungan-perkampungan baru di wilayah-wilayah pedalaman tersebut dan menamainya dengan nama yang sama dengan nama perkampungan asal mereka. Tidak mengherankan manakala pada saat ini banyak ditemukan nama-nama desa atau wilayah yang sama di kawasan Pulau Lombok, misalnya Taliwang, Karang Tapen dan lain-lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Hindu Karangasem yang telah menguasai Pulau Lombok tidak berani sepenuhnya melakukan kebijakan represif secara terbuka terhadap komunitas Muslim yang sejak awal telah

mengakar kuat di kawasan tersebut. Penguasa baru ini memandang bahwa melakukan tindakan represif terhadap komunitas Muslim bukan saja sangat beresiko, melainkan juga sangat tidak strategis bagi upaya menjaga kelangsungan kekuasaan kerajaan tersebut. Bagaimanapun juga komunitas Muslim telah mengakar kuat dan menjadi mayoritas penduduk yang mendiami kawasan pulau tersebut. Menerapkan kebijakan represif terhadap mereka hanya akan menyulut pemberontakan yang dengan cepat dapat meluas ke seantero pulau tersebut. Kalau pemberontakan dalam skala massif tersebut terjadi maka bukan tidak mungkin Kerajaan Hindu tersebut akan jatuh.

Kebijakan represif terhadap komunitas Muslim bagaimanapun tetap dilakukan oleh penguasa Hindu, tetapi tidak dilakukan secara terbuka. Tindakan-tindakan represif dilakukan secara rahasia, khususnya terhadap tokoh-tokoh. Muslim yang dianggap membahayakan kelangsungan kekuasaan Kerajaan Hindu Karangasem. Banyaknya makam-makam keramat yang tidak jelas siapa yang ada di dalamnya yang saat ini banyak dikunjungi oleh komunitas-komunitas Muslim memberikan kemungkinan untuk menyimpulkan bahwa makam-makam tersebut adalah makam-makam dari para tokoh Muslim di masa lalu yang dibunuh secara rahasia oleh penguasa Hindu. Meski demikian, penguasa Hindu juga melakukan politik akomodasi terhadap tokoh-tokoh Muslim yang dianggap kooperatif. Banyaknya patung-patung haji yang dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Hindu, seperti atung haji yang ditemukan di Mayora misalnya, adalah salah satu bukti adanya politik akomodasi tersebut. Bagaimanapun, penguasa Hindu dalam hal ini tidak dapat menegasikan bahwa kehadiran mereka secara gemilang ke Pulau Lombok juga atas berkat jasa Arya Banjar Getas, tokoh Muslim yang pernah menjadi patih di Kerajaan Islam Selaparang.

Dalam kerangka menjaga kelangsungan kekuasaannya, Penguasa Kerajaan Hindu Karangasem tersebut mempersilakan komunitas Muslim yang telah melarikan diri ke wilayah pedalaman untuk mendiami perkampungan-perkampungan di wilayah ibukota Kerajaan Hindu Karangasem. Mereka tidak direlokasikan di kawasan-kawasan yang telah didiami oleh komunitas Hindu yang mendiami wilayah-wilayah terdekat dengan istana kerajaan, melainkan ditempatkan secara terpisah di kawasan-kawasan yang terkepung oleh kawasan-kawasan berpenduduk Hindu, atau kawasan-kawasan ,terluar

dalam lingkup ibukota kerajaan. Relokasi semacam ini bukan saja dimaksudkan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya pemberontakan dan pembangkangan yang dilakukan komunitas Muslim, melainkan juga untuk menjadikan mereka sebagai tameng atau perisai hidup atas berbagai kemungkinan terjadinya serangan musuh dari luar. Menjadikan mereka sebagai tameng atau perisai hidup bukan saja akan memperlambat gerak pasukan musuh untuk memasuki istana melainkan juga akan memberikan waktu bagi upaya mengatur strategi penanggulangan serangan musuh.

Relokasi komunitas Muslim yang terpisali dari komunitas Hindu ini mengakibatkan tidak adanya pembauran di antara dua komunitas beda agama tersebut. Proses segregasi sosial di antara komunitas beda agama tersebut mulai mengkristal, di mana komunitas beda agama menempati kawasan yang berbeda. Di samping itu, model bangunan perumahan komunitas Hindu yang biasanya berpagar rumah yang tinggi dengan penjagaan anjing juga menyulitkan proses pembauran dengan komunitas Muslim. Proses segregasi sosial tersebut semakin mengkristal dengan diundangkannya sebuah peraturan oleh penguasa Hindu yang menyatakan bahwa komunitas Muslim tidak diperbolehkan untuk membeli tanah di wilayah ibukota kerajaan, hanya komunitas Hindu yang diperbolehkan membeli tanah-tanah tersebut. Peraturan ini tentu tidak memungkinkan komunitas Muslim membeli tanah pekarangan di lingkungan Hindu yang dengan sendirinya menutup rapat-rapat kemungkinan bagi proses pembauran antara komunitas Muslim dan Hindu.

Kerajaan Hindu Karangasem juga memonopoli penguasaan kawasan-kawasan pertanian yang subur dan memiliki sumber air yang memadai. Ungkapan "Di mana ada sumber air yang berlimpah di situlah komunitas Hindu akan menetap" merupakan salah satu bukti bagaimana penguasa Hindu di masa lalu memonopoli sumber-sumber air yang berlimpah. Sementara komunitas Muslim terkonsentrasikan di kawasan-kawasan pedalaman dan pesisir yang relatif jauh dari pusat pemerintahan.

Segregasi sosial juga tidak hanya mewujud dalam bentuk konsentrasi kawasan hunian di mana tempat tinggal komunitas Muslim terpisah dari komunitas Hindu, melainkan juga dalam bentuk tampilan fisik. Tradisi lisan yang berkembang di kalangan masyarakat menjelaskan bahwa di masa lalu

komunitas Hindu biasa melubangi telinga mereka sendiri, di samping juga menyelipkan kelewang di pundak mereka. Tanda-tanda fisik tersebut sengaja dibuat untuk memudahkan mereka melakukan identifikasi mana orang Hindu dan mana yang lain, sehingga dalam situasi perang antar agama akan memudahkan mengidentifikasi mana kawan dan mana lawan.¹⁰ Saat ini tanda-tanda fisik tersebut sudah mulai hilang secara perlahan-lahan.

E. Kawasan-kawasan *Wanen*

Di Pulau Lombok terdapat kawasan-kawasan yang biasa disebut sebagai kawasan *wanen*, yaitu kawasan yang penduduknya dikenal sebagai para pemberani, tidak mengenal rasa takut dan cenderung mudah tersinggung. Beberapa kawasan tersebut di antaranya adalah Sekar Bela,¹¹ Taliwang, Karang Genteng, Patemon dan Karang Tapen.

Penduduk kawasan-kawasan ini mengidentifikasi diri sebagai keturunan para prajurit dan pejuang yang gagah berani, dan karenanya mewarisi darah perang para prajurit yang pantang menyerah.¹² Selain dikenal memiliki sifat pemberani mereka juga dikenal memiliki jiwa korsa, sebuah ikatan kebersamaan yang sangat tinggi. Sebuah penghinaan yang dilakukan terhadap satu orang dari penduduk kawasan ini akan dianggap sebagai penghinaan terhadap keseluruhan penduduk kawasan tersebut, apalagi jika penghinaan tersebut terkait dengan persoalan agama. Ketika akan terjadi mesiat, yaitu perang dalam skala massif, mereka mengumumkannya di masjid setempat. Setelah mendengar pengumuman tersebut, penduduk kawasan-kawasan tersebut biasanya segera berkumpul di depan masjid dengan membawa bermacam senjata yang mereka miliki. Mereka telah bersiap untuk menerima komando untuk berangkat mesiat.¹³

Di kawasan-kawasan *wanen* ini, konflik lebih banyak terjadi. Persoalan-persoalan kecil yang terjadi kelompok Hindu di luar kawasan ini akan me-

¹⁰ Tuan Guru Shofwan Hakim, wawancara, tanggal 6 Juli 2009.

¹¹ Sumber-sumber lokal menceritakan bahwa Sekar Belo merupakan kawasan yang dihadiahkan oleh Penguasa Hindu Karangasem pada prajurit muslim yang tinggal di Taliwang. Komunitas muslim Sekar Belo merupakan keturunan komunitas muslim Taliwang. Muhammad Nahwi, wawancara, tanggal 6 Juli 2009.

¹² H. hammad Nahwi, wawancara, tanggal 6 Juli 2009.

¹³ Tuan Guru Shofwan Hakim, wawancara, tanggal 6 Juli 2009.

rembet menjadi konflik dalam skala massif. Sebagai keturunan para prajurit dan pejuang, mereka akan menganggap bahwa masalah ini merupakan lanjutan dari masalah-masalah yang telah terjadi sebelumnya, dan karenanya mereka akan menjadikan diri mereka sebagai penjaga Islam di barisan terdepan. Mereka berpegang teguh pada petuah lama: *Bali dateng kadu perang, ulik kadu perang* yang berarti Orang Hindu Bali datang dengan perang maka harus pergi dari Lombok juga dengan perang.

Kawasan-kawasan *wanen* ini juga merupakan kawasan yang paling mudah untuk memobilisasi massa guna melakukan aksi dalam skala massif. Mereka adalah "relawan-relawan" yang siap setiap saat untuk membantu saudara seagamanya ketika dibutuhkan. Ketika di kawasan Lombok Timur yang mayoritas Muslim hendak didirikan sebuah pura Hindu yang akan diproyeksikan sebagai pura terbesar di Asia Tenggara, komunitas Muslim di kawasan-kawasan *wanen* ini pun segera menentangnya. Meski berhembus kabar bahwa rencana pembangunan pura tersebut telah mendapatkan ijin dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan kepanitiannya terdiri dari para jenderal yang ada di Jakarta, komunitas Muslim penentang yang berasal dari kawasan *wanen* ini tidak sedikit pun gentar. Mereka bahkan mengancam akan merusak semua prasarana yang akan digunakan dan menghadapi siapa saja yang nekat meneruskan rencana pembangunan pura tersebut. Mereka mempersilakan kelompok pendukung rencana pembangunan pura tersebut untuk memilih: "batalkan rencana pembangunan pura tersebut yang berarti damai atau teruskan yang berarti perang!" Mereka mengatakan: "Orang Lombok itu *lumbuk* (lurus dan tegas). Mau putih ya dikasih putih, mau hijau ya dikasih hijau, tapi kalau maunya merah ya akan dikasih merah."¹⁴ Merah dalam konteks ucapan tersebut berarti perang yang berdarah-darah.

F. Membangun Komunikasi dan Budaya Damai

Meski terpolarisasikan oleh perbedaan agama, bukan berarti tidak ada upaya membangun komunikasi dan budaya damai di antara komunitas Muslim dan Hindu di Pulau Lombok. Kedua komunitas berbeda agama tersebut tidak hanya memiliki cerita perang, melainkan juga memiliki cerita damai. Cerita damai tersebut bisa dilihat dalam kisah perkawinan antara

¹⁴ Tuan Guru Shofwan Hakim, wawancara, tanggal 6 Juli 2009.

Anak Agung Gde Ngurah, penguasa Karangasem Sasak, dengan Dede Fatimah, wanita bangsawan Muslim setempat. Cerita lisan yang berkembang di kalangan masyarakat menuturkan Dede Fatimah yang terkenal kecantikannya di seluruh penjuru Pulau Lombok itu pun bersedia menerima pinangan penguasa Hindu tersebut dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sang raja. *Pertama*, Dede Fatimah tetap diperbolehkan menjalankan syari'at Islam sebagaimana sebelumnya. Raja juga harus memperbolehkan umat Islam yang lain untuk menjalankan syari'at agamanya. *Kedua*, raja harus mempermudah segala urusan yang terkait dengan peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji. *Ketiga*, raja harus membangun asrama haji di Kota Makkah yang diperuntukkan bagi umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji di kota suci tersebut. Konon, sang raja tidak berkeberatan untuk memenuhi persyaratan tersebut, bahkan dia ikut mendorong kehidupan damai antara komunitas Hindu dan Muslim di wilayah kekuasaannya.¹⁵

Meski bisa dimakanai politis, cerita lisan mengenai pemberian beberapa kawasan di wilayah ibukota kerajaan pada komunitas Muslim juga bisa dimaknai sebagai satu upaya membangun komunikasi damai yang dilakukan oleh penguasa Hindu. Pemberian beberapa kawasan di seputar istana kerajaan kepada komunitas Muslim tersebut menunjukkan adanya pemberian ruang kebebasan bagi enganut agama lain di luar agama penguasa.

Dalam upaya membangun komunikasi damai dan mengembangkan sikap tenggang rasa, komunitas beda agama di kawasan Pulau Lombok mengembangkan kearifan lokal (*traditional wisdom*), sebuah kearifan yang berkembang secara turun-temurun. Mereka umpamanya mempopulerkan ungkapan jauh batik mesak, yang berarti bawa dan pegangi pendapat sendiri dan jangan salahkan orang lain. Ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap orang harus berpegang teguh pada ajaran agamanya, tetapi tetap harus menghormati ajaran agama orang lain. Setiap orang tidak diperkenankan untuk menghina dan melecehkan ajaran agama lain.

Komunitas beda agama tersebut juga mengembangkan budaya saling *ngejot*, yaitu budaya saling memberi dan mengantarkan makanan di antara mereka. Warga Muslim memberi dan mengantarkan makanan pada warga Hindu, dan warga Hindu juga mengantarkan makanan pada warga Muslim.

¹⁵ Tuan Guru Subky al-Sasaky, wawancara, tanggal 7 Juli 2009.

Tentu saja, makanan-makanan yang diberikan harus mempertimbangkan dimensi-dimensi kepercayaan masing-masing agama. Makanan yang diberikan kepada warga Hindu haruslah selain daging sapi, karena binatang tersebut disucikan oleh agama Hindu dan karenanya tidak boleh disembelih apalagi dimakan dagingnya. Sementara makanan yang diberikan pada warga Muslim haruslah makanan yang tidak mengandung najis atau daging binatang yang dianggap najis seperti anjing dan babi.

Mereka juga mengembangkan budaya *saling besila*, yaitu budaya saling mengundang satu sama lain. Warga Hindu misalnya akan mengundang tetangganya yang Muslim untuk hadir dalam pesta perkawinan yang mereka selenggarakan. Warga Muslim juga akan mengundang warga Hindu untuk hadir dalam perayaan-perayaan keagamaan yang mereka selenggarakan. Dalam hal ini, pihak pengundang juga akan mempertimbangkan makanan yang akan disajikan pada pihak yang diundang.

Komunitas beda agama tersebut juga ikut aktif dalam budaya *nyongkol*, yaitu budaya pengantin pria mengantarkan pengantin wanita ke rumahnya yang biasanya dilaksanakan tujuh hari setelah hari perkawinan mereka. Dalam hal ini, mereka tidak pandang bulu apa agama mereka, mereka tetap ikut mengantarkan rombongan tersebut.

Upaya mengembangkan sikap tenggang rasa di kalangan komunitas beda agama di Palau Lombok diwujudkan dengan beberapa hal, misalnya komunitas Muslim menghormati umat Hindu dengan cara tidak menyalakan lampu secara mencolok pada malam hari raya Nyepi, di mana pada malam itu umat Hindu melakukan pemadaman lampu secara total (*amati geni*). Bahkan, beberapa kalangan Muslim bukan hanya tidak menyalakan lampu secara mencolok, mereka bahkan ikut membantu para pecalang, yaitu para pemuda Hindu yang bertugas menjaga dan mengamankan pelaksanaan ibadah umat Hindu.

Umat Islam juga berusaha agar pelaksanaan ibadah mereka tidak mengganggu ketenangan umat Hindu. Pada bulan Ramadhan misalnya umat Islam melakukan *tadarrusan*, yaitu membaca al-Qur'an, dengan menggunakan loud speaker hanya sampai pada jam 22.00 WIB. Selebihnya mereka melakukan *tadarrusan* di masjid dengan tanpa menggunakan pengeras suara tersebut meski para tetangga beragama yang Hindu mempersilakan dan tidak keberatan warga Muslim *tadarrusan* sampai larut malam. Sementara komunitas Hindu juga menampakkan sikap tenggang rasa mereka dengan tidak merokok atau makan di jalan di siang hari di bulan Ramadhan.

Sementara komunitas Hindu juga berupaya agar upacara-upacara keagamaan mereka tidak mengganggu ketenangan komunitas Muslim. Pada saat upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat misalnya, tokoh komunitas Hindu akan berkoordinasi dengan tokoh komunitas Muslim. Hal ini dilakukan karena dalam rangkaian upacara tersebut ada upacara massal membawa sesajian dari rumah duka ke tempat pembakaran mayat yang melibatkan banyak orang dengan berbagai alat musik. Ketika pelaksanaan upacara tersebut berlangsung pada hari Jum'at yang berbarengan dengan pelaksanaan shalat Jum'at, maka para tokoh kedua komunitas beda agama tersebut pun berkoordinasi untuk mendesain agar upacara-upacara peribadatan tersebut masing-masing dapat berlangsung tanpa ada yang harus merasa terganggu.

Upaya membangun damai juga dilakukan dengan menyepakati pekuburan umum sebagai fasilitas publik. Setiap warga baik berhak untuk dimakamkan di pemakaman umum tersebut, termasuk komunitas Hindu yang ingin agar jenazah keluarganya tidak dibakar melainkan dikuburkan.

Dalam rangka menghindari konflik antar umat beda agama, berbagai langkah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Hal ini terjadi misalnya ketika mengemuka rencana membangun sebuah pura seluas 20 are (2000 M²) di depan Masjid Zakaria di kawasan Mayura. Suasana menjadi panas karena di kawasan tersebut tidak ada satupun penganut agama Hindu, sehingga rencana pembangunan masjid pura tanpa jama' ah tersebut dinilai hanya untuk memprovokasi komunitas Muslim di kawasan tersebut. Suasana panas tersebut tampaknya tidak membuat pihak yang merencanakan pembangunan pura tersebut mengurungkan niatnya. Mereka bahkan dengan demonstratif memulai pembangunan tersebut.

Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) setempat yang tampaknya mencium gelagat tidak kondusif tersebut pun segera turun tangan. Kapolsek yang beragama Hindu tersebut kemudian menghentikan paksa pembangunan tersebut. Dia bahkan merusak beberapa bagian yang telah sempat dibangun. Langkah Kapolsek tersebut dengan sendirinya menghindarkan konflik sosial antar pemeluk agama yang berbeda agama.

G. Kesimpulan

Segregasi etno-religius di wilayah Lombok, khususnya di Mataram selain terjadi karena migrasi penduduk, juga merupakan implikasi dari penerapan

kebijakan politik kerajaan Hindu Karangasem Mataram yang menguasai wilayah ini selama 1,5 abad, yaitu dari tahun (1670-1820 M). Kebijakan itu antara lain dalam bentuk mempertahankan stratifikasi sosial masyarakat dalam pemukiman, sehingga melahirkan komunitas Bali-Hindu sebagai kelompok bangsawan dan komunitas Sasak-Islam sebagai kelompok rakyat kelas bawah. Warisan sejarah itu menjadi hambatan psikologis-sosial kedua komunitas untuk berinteraksi secara terbuka dan saling mempercayai.

Segregasi etno-religius berpotensi untuk menimbulkan konflik, terutama ketika ada pemicu yang berkaitan dengan sentimen etnis dan agama. Namun, tidak berarti tidak ada pengembangan interaksi damai antara kedua komunitas etno-religius itu. Potensi damai berkembang melalui *local wisdom*, seperti tradisi *nyongkol*, tradisi *saling ngejot* dan *saling besila'* antara kedua komunitas tersebut.[w]

BIBLIOGRAFI

- Benedict Anderson, *Violence and the State in Suharto's Indonesia*, Ithaca: Southeast ASIA Program, Cornell University, 2001.
- Peter Blau, *Inequity and Homogeneity: a Primitive Theory of Social Structure*, New York: The Free Press, 1977.
- Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.
- Vvahid, Irvan, "Anatomi Konflik Etno-religius di Pulau Lombok," *Laporan Penelitian*, 2008.
- Yudhistira K. Garna, "Konflik dan Resolusi Konflik di Nusa Tenggara Barat," *Laporan Penelitian*, 2001.
- Ismail dkk, "Dinamika Pluralisme Agama di Nusa Tenggara Barat," *Laporan Penelitian*, 2008.
- Mustain dkk, "Hubungan Muslim-Hindu di kota Mataram: Kajian tentang Potensi Konflik dan Integrasi," *Laporan Penelitian*, 2008.
- Fawaizul Umam, "Antara Membina dan Memperbanyak Umat: Pola Penyiaran Agama Hindu dan Islam di Kota Mataram," *Laporan Penelitian*, 2006.
- M. Natsir dkk, "Pemetaan Kerukunan Hidup Beragama di Lombok," *Laporan Penelitian*, 2006.
- Mahmudin, "Segregasi dan Keadilan Ruang (Kasus Studi: Lingkungan Perumahan Dualistik di Bandung dan Makassar)," *Laporan Penelitian* .
- Misbah Zulfa Elizabeth, "Multi Etnisitas Indonesia dan Potensi Konflik di Dalamnya" dalam Musahadi HAM (ed.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007.
- Wahjudin Sumpeno, *Memimpin Perdamaian: Modul Pelatihan Mediasi dan Resolusi Konflik untuk Pemimpin Desa*, Banda Aceh: Bappenas dan World Bank, 2009.
- Paul Procter, *Longman Dictionary of Contemporary English*, London: Longman Group Limited, 1978.